

Peluang dan Tantangan Profesi Akuntan Publik Indonesia Pasca GATT

Oleh : Marfuah Prasetyo

Pendahuluan

Pada tanggal 15 April 1995, perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay telah dinyatakan selesai. Suatu dokumen hasil perundingan Putaran Uruguay, termasuk persetujuan pembentukan World Trade Organization (WTO) telah ditandatangani. Tujuan perundingan Putaran Uruguay tersebut adalah memperbarui tatanan pengaturan perdagangan internasional dengan meningkatkan dan memperluas perjanjian GATT 1947 menjadi perjanjian GATT 1994. Sehingga perdagangan dunia menjadi lebih bebas, adil dan transparan. Salah satu hasil perundingan adalah disepakatinya perdagangan jasa-jasa.

Dalam kesempatan perdagangan jasa-jasa masih ada beberapa sektor yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Salah satu diantaranya adalah jasa profesi, termasuk profesi akuntan publik. Meskipun demikian Indonesia sebagai negara anggota harus selalu mencermati setiap perkembangan yang terjadi agar mampu mengantisipasi dampaknya baik yang positif maupun yang negatif. Karena cepat atau lambat profesi akuntan publik Indonesia harus membuka pintu bagi masuknya

jasa akuntan asing.

Akuntan publik sebagai salah satu tipe akuntan profesional harus siap untuk menghadapi kemungkinan masuknya akuntan asing ke Indonesia. Hal ini merupakan tantangan yang tidak ringan, mengingat selama ini profesi akuntan mendapat proteksi dari pemerintah dengan tidak diijinkannya akuntan asing beroperasi di Indonesia. Belum lagi bila membicarakan mutu akuntan kita dibanding dengan akuntan asing.

Meskipun demikian memang tidak tertutup kemungkinan bagi profesi akuntan publik untuk menikmati peluang yang ada dengan dibukanya pasar bebas sebagai akibat disepakatinya perjanjian GATT.

Profesi Akuntan Publik

Akuntan publik adalah¹⁾ akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama ditujukan untuk

1). Mulyadi, Pemeriksaan Akuntan, Edisi-4, BP STIE YKPN, Yogyakarta, 1992, Hal. 27

memenuhi kebutuhan para kreditur, investor, calon kreditur, calon investor dan instansi pemerintah (terutama pajak). Disamping itu akuntan publik juga menjual jasa lain kepada masyarakat seperti konsultasi pajak, konsultasi bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Untuk berpraktek sebagai akuntan publik, seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. Akuntan publik harus telah lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi atau mempunyai ijazah yang disamakan, telah mendapatkan gelar akuntan dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan, ditambah pengalaman kerja di kantor publik selama dua tahun dan mendapat ijin praktek dari Menteri Keuangan.

Akhir-akhir ini profesi akuntan publik menunjukkan perkembangannya. Hal ini disebabkan makin meningkatnya kesadaran masyarakat usaha akan pentingnya jasa akuntan dan semakin tumbuhnya usaha-usaha swasta serta adanya peraturan pemerintah yang ikut mendorong perkembangan akuntan publik yaitu disyaratkannya perusahaan yang akan go publik agar laporan keuangannya sudah diperiksa oleh akuntan publik dua tahun terakhir berturut-turut dengan pendapat wajar tanpa syarat (*unqualified opinion*).

Disamping itu, beberapa faktor yang lain adalah sektor perbankan yang mengharuskan calon debiturnya mempunyai administrasi yang baik dan laporan keuangannya sudah diperiksa oleh akuntan publik, adanya usaha joint venture dengan perusahaan asing dan adanya beberapa faktor akuntan asing yang

beroperasi di Indonesia walaupun dalam bentuk *joint partnership*. Adanya kerjasama dalam bidang perekonomian antara berbagai negara secara regional maupun multilateral yang berkembang akhir-akhir ini nantinya juga turut mempengaruhi perkembangan akuntan publik Indonesia.

Salah satu yang dituntut dari pertumbuhan perekonomian yang cepat ini adalah ditingkatkannya mutu informasi di bidang keuangan, dimana fungsi akuntan publik sebagai faktor penunjang utama, penghubung antara manajemen, pemodal, pemerintah, kreditur dan lain-lain sangat penting dan dominan. Dalam kaitan ini perlu diusahakan bersama dan dipercepat langkah-langkah untuk meningkatkan mutu jasa akuntan publik agar seimbang dengan kebutuhan jasa akuntansi di dunia usaha yang telah sangat berkembang.

Pengguna jasa akuntan semakin menginginkan peningkatan mutu dari layanan jasa para akuntan. Tidak hanya peningkatan mutu pada layanan jasa konvensional seperti *General Audit* dan *Taxation Service*, tapi meliputi wilayah-wilayah baru di bidang *Investment, Capital Market, Pension Fund* dan sebagainya.

GATT Sebagai Liberalisasi Ekonomi

Dalam tatanan ekonomi yang cepat berubah sekarang ini, setiap negara termasuk Indonesia dituntut untuk mengikuti secara cermat kecenderungan-kecenderungan perekonomian dunia yang sedang dan akan terjadi, sehingga dapat mengambil manfaat yang maksimal dari perubahan tersebut. Sejalan dengan itu, kerjasama multilateral dan regional semakin banyak dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia

tersebut. Salah satu kerjasama dimana Indonesia ikut sebagai anggotanya adalah perjanjian GATT.

Pada tanggal 15 April 1994, perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay telah dinyatakan selesai dengan ditandatanganinya suatu dokumen hasil perundingan Putaran Uruguay, termasuk persetujuan pembentukan **World Trade Organization (WTO)**. Tujuan perundingan Putaran Uruguay tersebut adalah memperbaiki tatanan perdagangan internasional dengan meningkatkan dan memperluas perjanjian GATT 1947 menjadi perjanjian GATT 1994 sehingga perdagangan dunia menjadi lebih bebas, adil dan transparan.

Peningkatan dan perluasan perjanjian tersebut diupayakan dengan jalan:²⁾

1. Melakukan interpretasi baru mengenai berbagai pasal perjanjian GATT 1947.
2. Menambah cakupan perjanjian GATT yang meliputi:
 - a. Hasil pertanian
 - b. Tekstil dan pakaian jadi
 - c. Perdagangan jasa
 - d. Aturan-aturan perlindungan hak milik intelektual yang berkaitan dengan perdagangan (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs)
 - e. Aturan-aturan Investasi yang berkaitan dengan perdagangan (Trade-Related Investment Measures - TRIMs).
3. Melakukan kesepakatan baru mengenai berbagai aturan perdagangan (Rules Making).
4. Membentuk organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization - WTO).

Dengan disetujuinya GATT berarti terbukalah dunia ke arah liberalisasi ekonomi.³⁾ Dengan demikian, sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu mencermati perkembangan perekonomian dunia agar tetap mampu mengantisipasi setiap dampaknya, baik yang positif maupun yang negatif demi tercapainya kepentingan nasional.

GATT dan Implikasinya bagi Profesi Akuntan Publik Indonesia

Sebelum menguraikan tulisan tentang GATT dan implikasinya bagi profesi akuntan publik, terlebih dahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai prinsip-prinsip perjanjian perdagangan jasa yang telah disepakati yaitu:⁴⁾

1. *Most Favoured Nation (MFN)*, yaitu tidak membedakan (no less favourable) terhadap jasa dan/atau pemasok jasa yang berasal dari negara anggota.
2. *National Treatment*, yaitu tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap jasa dan/atau pemasok jasa dari luar negeri dibandingkan dengan jasa dan/atau pemasok jasa yang berasal dari dalam negeri.
3. *Transparency*, yaitu keharusan

2). Sanyoto Sastrowardoyo, *Prospek Ekonomi Indonesia Di Masa Mendatang*, Makalah Seminar Nasional GATT dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia, Yogyakarta, 18 Juni 1994, HI 4-5.

3). Hartarto, *Mekanisme GATT Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia*, Artikel "Media Invasi", No. 9 tahun VI, September 1994/1415 H, Hal.17.

4). Muchtar, *Mekanisme GATT Dalam Perekonomian Dunia Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia*, Makalah Seminar Nasional GATT Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia Yogyakarta, 18 Juni 1994, Hal 11-12.

menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan yang mempengaruhi perdagangan jasa-jasa, khususnya bagi jasa yang telah masuk dalam komitmen.

Dalam perundingan perdagangan jasa-jasa diharapkan semua negara mengurangi hambatan perdagangan jasa sebanyak mungkin. Namun ternyata pada akhir perundingan masih ada sektor-sektor yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, yaitu sektor jasa keuangan, perhubungan laut, telekomunikasi dasar, profesi (khususnya akuntan), dan audio visual.

Meskipun dalam perundingan perdagangan jasa, jasa akuntan publik termasuk sektor yang belum tuntas pembahasannya, Indonesia sebagai negara anggota harus selalu mencermati perkembangan yang terjadi. Dalam kaitan ini kita harus bisa melihat peluang maupun tantangan yang akan dihadapi oleh profesi akuntan publik.

Penandatanganan GATT tersebut menciptakan tantangan sekaligus peluang yang perlu dimanfaatkan.⁵⁾ Tantangan yang mungkin timbul adalah kemungkinan masuknya akuntan asing beroperasi di Indonesia. Masuknya akuntan asing di Indonesia pertama-tama akan berpengaruh terhadap: perusahaan penanaman modal asing (PMA), perusahaan yang melakukan penawaran umum (Public Offering) di Indonesia dan perusahaan yang melakukan penawaran umum di pasar internasional (Go International).

Masuknya akuntan asing dalam jangka pendek akan menciptakan adanya gap antara akuntan dari negara-negara maju

dengan akuntan Indonesia. Hal ini terutama berhubungan dengan pemahaman praktek bisnis internasional, standar akuntansi dan auditing, serta aspek disclosure dan financial engineering lainnya. Secara umum, akuntan di negara maju memang mempunyai profesionalisme yang lebih baik serta memiliki kelebihan dalam *competitive advantages*.

Disamping tantangan di atas, GATT sekaligus menciptakan peluang yang harus dimanfaatkan terutama dalam kaitannya dengan akses terhadap pasar internasional. Hal ini disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut :

1. Sejalan dengan pesatnya perkembangan bisnis, perkembangan teknis dan praktek akuntansi yang semakin cepat, sehingga mengharuskan akuntan untuk mengikuti secara terus menerus perkembangan tersebut melalui pemanfaatan akses pasar internasional.
2. Semakin banyaknya perusahaan Indonesia yang melakukan Go International perlu dimanfaatkan oleh profesi akuntan untuk menimba pengalaman. Bahkan keadaan sebaliknya dapat terjadi, dimana perusahaan asing mungkin akan melaksanakan penawaran umum (Public Offering) di Indonesia.
3. Masuknya akuntan asing di Indonesia akan memaksa akuntan Indonesia untuk secara terus menerus meningkatkan kemampuan teknisnya.

Khusus pasar domestik pasca GATT, akuntan Indonesia tetap melebihi terutama

5). IP.G. Ary Suta, Peranan akuntan Publik Dalam Perkembangan Pasar Modal, Makalah Pendidikan Profesi Lanjut Pada Kongres IAI VII, Bandung, 19 s/d 21 September 1994, Hal.9.

dalam hal :

1. Pemahaman peraturan dan perundang-undangan di Indonesia.
2. Corporate Culture
3. Business environment.

Penutup

Akuntan publik sebagai profesi, tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan, terutama perkembangan ekonomi yang semakin cepat seperti sekarang ini. Salah satunya adalah hasil kesepakatan GATT mengenai perdagangan jasa-jasa, dimana jasa akuntan publik termasuk di dalamnya.

Penandatanganan GATT mempunyai implikasi yang positif maupun negatif bagi akuntan publik Indonesia. Implikasi yang positif merupakan peluang yang harus dimanfaatkan terutama dalam kaitannya dengan akses terhadap pasar internasional. Sedangkan implikasi negatif merupakan tantangan yang harus diantisipasi dari dicari jalan keluarnya.

Tantangan yang dihadapi oleh akuntan publik sebagai akibat kesepakatan GATT adalah kemungkinan masuknya akuntan asing beroperasi di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan adanya gap antara akuntan dari negara-negara maju dengan akuntan Indonesia, karena secara umum akuntan di negara maju mempunyai profesionalisme yang lebih baik serta memiliki *competitive advantages*.

Oleh karena itu agar akuntan publik Indonesia mampu bersaing dengan akuntan asing, yang harus dilakukan dan tidak bisa ditunda adalah meningkatkan mutu akuntan publik kita. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu akuntan publik adalah melalui program ujian sertifikasi dan program pendidikan berkelanjutan.⁶⁾

Daftar Pustaka

- Bambang Hartadi, Auditing: Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi. Tahap Pendahuluan, Edisi 1, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1990.
- Hartarto, Perekonomian Indonesia, Artikel "Media Inovasi". No.9 Tahun VI, September 1994/1415.
- IP. G. Ary Suta, Peranan Akuntan Publik dalam Perkembangan Pasar Modal, Makalah Pendidikan Profesi Lanjut pada Konggres IAI VII, Bandung, 19 s/d 21 September 1994.
- Kartono Wiryobroto, Ujian Sertifikasi bagi Akuntan Publik Serta Perundang-undangan Akuntan, Makalah Seminar Sertifikasi Akuntan Publik, Yogyakarta, 27 Januari 1994.
- Muchtar, Mekanisme GATT dalam Perekonomian Dunia dan Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia, Makalah Seminar Nasional GATT dan Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia, Yogyakarta, 18 Juni 1994.
- Mulyadi, Pemeriksaan Akuntan, Edisi 4, BP STIE YKPN, Yogyakarta, 1992.
- Sanyoto Sastrowardoyo, Prospek Ekonomi Indonesia di Masa Mendatang, Makalah Seminar Nasional GATT dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia, Yogyakarta, 18 Juni 1994.

6). Kartono Wiryobroto, Ujian Sertifikasi bagi Akuntan Publik Serta Perundang-undangan Akuntan, Makalah Seminar Sertifikat Akuntan Publik, Yogyakarta, 27 Januari 1994, Hal. 8